

PENGARUH PENANAMAN MODAL ASING, PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI, DANA PERIMBANGAN, DAN AGLOMERASI TERHADAP KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2011-2020

Galuh Gita Lestari* dan Mulyo Hendarto Robertus

Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

*Corresponding Email: galuhgitallestari@students.undip.ac.id

ABSTRACT

Regional disparity is a common phenomenon in the process of regional economic development in developing countries. In order to reduce regional disparity, it is necessary to study the factors that influence regional disparity. This research aims to analyze the effect of Foreign Direct Investment (PMA), Domestic Direct Investment (PMDN), Balancing Funds, and Agglomeration on Regional Development Disparity in Banten Province in the 2011-2020 period. This study uses panel data regression analysis with the Random Effect Model (REM) approach. The regression results with the Random Effect Model (REM) approach with the Generalized Least Square (GLS) method show that in 2011-2020, partially the variables of foreign direct investment, domestic direct investment, and agglomeration have no a significant effect, and only the balancing fund variable has a significant effect on regional development disparity in a negative direction.

Keywords: Regional Development Disparity, Foreign Direct Investment, Domestic Direct Investment, Balancing Funds, and Agglomeration.

 <https://doi.org/10.14710/djoe.37984>



[This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license](#)

PENDAHULUAN

Pada tahun 1970-an, pembangunan ekonomi mulai didefinisikan kembali dalam kaitannya dengan upaya peniadaan atau pengurangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran, sebagai dampak dari pengalaman pada tahun 1950-an dan 1960-an ketika negara-negara yang sedang berkembang mencapai target pertumbuhan ekonominya, akan tetapi taraf dan kualitas hidup sebagian besar masyarakat umumnya tidak mengalami perbaikan (Todaro dan Smith, 2011). Oleh karena itu, selain percepatan pertumbuhan ekonomi, pembangunan juga harus dipahami sebagai proses multidimensi yang melibatkan perubahan dalam struktur sosial, perilaku, dan kelembagaan, serta meliputi pengentasan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan (Todaro dan Smith, 2011). Sjafrizal (2018) juga mengemukakan bahwa ketimpangan antar wilayah bukan hanya fenomena umum dalam proses pembangunan ekonomi suatu daerah di negara berkembang, namun juga di negara maju walaupun tingkat

ketimpangannya berbeda. Dengan demikian dalam pembangunan tidak terlepas dari permasalahan ketimpangan.

Provinsi Banten tergolong provinsi baru yang memiliki pertumbuhan ekonomi cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa provinsi lain yang ada di Pulau Jawa. Kesuksesan ini ditopang oleh kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB Provinsi Banten. Namun tidak semua daerah di Provinsi Banten memiliki kondisi yang sama, karena perkembangan industri pengolahan ini tidak tersebar merata ke seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten. Menurut Arsyad (2010), pembangunan ekonomi dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan per kapita, dengan kenaikan tersebut telah merefleksikan terjadinya tambahan pendapatan serta timbul perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Terdapat perbedaan yang mencolok dari besar kecilnya PDRB per kapita yang dihasilkan oleh kabupaten/kota di Provinsi Banten, dimana terdapat daerah yang memiliki PDRB per kapita jauh di atas PDRB per kapita provinsi, juga terdapat daerah dengan PDRB per kapita yang jauh lebih kecil dari PDRB per kapita provinsi. Menurut Sjafrizal (2018) ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan perbedaan antara daerah maju dan daerah tertinggal yang diukur dengan tingkat Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita antar daerah.

Tabel 1. Perkembangan Indeks Williamson Provinsi Banten

Tahun	Indeks Williamson
2011	0,632152986
2012	0,636085152
2013	0,637033476
2014	0,639202408
2015	0,637012288
2016	0,629957731
2017	0,627456093
2018	0,627305595
2019	0,624018262
2020	0,623132998

Keterangan: Nilai Indeks Williamson dihitung menggunakan data PDRB per kapita dan jumlah penduduk

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Banten, 2022, diolah

Provinsi Banten belum lepas dari masalah ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pada tahun 2011-2020, nilai Indeks Williamson Provinsi Banten berada pada *level* ketimpangan sedang yakni berada di angka 0,6 ke atas. Berdasarkan kondisi tersebut, dalam upaya untuk mengurangi ketimpangan, diperlukan penelitian yang berkaitan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Menurut (Sjafrizal, 2018), dana pembangunan (investasi pemerintah dan swasta) antar wilayah, serta konsentrasi kegiatan ekonomi daerah menjadi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketimpangan antar wilayah.

Adanya aglomerasi di suatu daerah diharapkan dapat menghemat biaya produksi sehingga memaksimalkan keuntungan yang diperoleh. Akan tetapi konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi pada wilayah tertentu dapat mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah, dimana, daerah dengan konsentrasi ekonomi cukup tinggi cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang memiliki konsentrasi ekonomi lebih rendah (Sjafrizal, 2018). Investasi memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Namun, jika investasi

yang masuk terfokus hanya di beberapa daerah, maka dapat mengakibatkan ketimpangan pembangunan antar wilayah semakin melebar. Dana perimbangan memiliki tujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi sekaligus untuk mengurangi ketimpangan pembangunan. Namun setelah sekian lama diterapkan, sistem ini memiliki kekurangan dan kelemahan yakni adanya keterbatasan kemampuan keuangan negara, dan alokasi dana yang didasarkan pada kemampuan produksi daerah bersangkutan, dimana daerah yang kaya akan menjadi semakin kaya, begitu juga sebaliknya (Sjafrizal, 2018).

Mengacu pada latar belakang dan permasalahan tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dana perimbangan, dan aglomerasi terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Banten tahun 2011-2020.

TINJAUAN PUSTAKA

Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah

Menurut model pertumbuhan Neo-Klasik Spasial, pertumbuhan ekonomi regional akan sangat ditentukan pada kemampuan regional tersebut dalam meningkatkan produksinya, sementara kegiatan produksi daerah tidak hanya ditentukan oleh potensi daerah yang terkait, tetapi dipengaruhi pula oleh mobilitas tenaga kerja maupun mobilitas modal antar wilayah. Dalam hal ini model Neo-Klasik beranggapan bahwa pada permulaan proses pembangunan, mobilitas faktor produksi, baik tenaga kerja maupun modal adalah kurang lancar, sehingga ketimpangan pembangunan wilayah cenderung melebar, ketika proses pembangunan terus berlanjut, mobilitas modal dan tenaga kerja akan semakin lancar, sehingga ketimpangan pembangunan akan mulai berkurang. Perkiraan ini dikenal sebagai Hipotesis Neo-Klasik, yakni prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah (Sjafrizal, 2008).

Myrdal mengemukakan bahwa ketimpangan wilayah erat kaitannya dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba (Jhingan, 1996). Motif laba tersebut mendorong pembangunan terpusat di wilayah-wilayah yang mempunyai harapan laba tinggi, sedangkan wilayah-wilayah yang lainnya tetap terbelakang. Lingkup investasi yang lebih baik pada pusat-pusat ekspansi dapat menciptakan kekurangan modal di wilayah terbelakang (Jhingan, 1996). Hal ini merupakan salah satu bentuk *backwash effect* (dampak balik) dari pergerakan modal yang hanya terfokus di wilayah yang memiliki harapan laba tinggi.

Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri

Undang-Undang No 27 Tahun 2007 mendefinisikan Penanaman Modal Asing sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri, sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara

Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Investasi yang terfokus hanya di beberapa daerah menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap ketimpangan. Sebab, kekuatan yang berperan besar dalam menarik investasi swasta (PMA dan PMDN) ke suatu wilayah adalah keuntungan lokasi yang dimiliki suatu wilayah (Sjafrizal, 2008). Keuntungan lokasi yang dimaksud berupa daerah yang memiliki harapan lebih tinggi yang dapat menghasilkan keuntungan yang menjanjikan, yang akan dilirik oleh investor domestik maupun asing.

Dana Perimbangan

Investasi pemerintah dikendalikan melalui pembentukan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan hal tersebut. Di Indonesia, alokasi investasi pemerintah diformulasikan khusus, yang dikenal dengan dana perimbangan yang mulai ditetapkan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Adanya otonomi daerah tersebut memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, yakni memungkinkan daerah dapat menentukan sendiri kegiatan ekonomi maupun pembangunan yang layak bagi daerahnya, serta dapat mendorong daerah untuk menemukan kreasi baru yang terbaik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing yang dapat mendorong proses pembangunan lebih cepat (Sjafrizal, 2018).

Alokasi dana perimbangan pada dasarnya bertujuan untuk menjamin pelaksanaan pemerintahan daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus untuk mengurangi ketimpangan pembangunan, namun setelah sekian lama diterapkan di Indonesia, terlihat bahwa sistem ini memiliki kekurangan dan kelemahan, yakni adanya keterbatasan kemampuan keuangan negara, dan alokasi dana yang didasarkan pada kemampuan produksi daerah bersangkutan, dimana daerah yang kaya akan menjadi semakin kaya, begitu juga sebaliknya (Sjafrizal, 2018).

Aglomerasi

Brühlhart dan Sbergami (2009) mendefinisikan aglomerasi sebagai konsentrasi spasial kegiatan ekonomi. Menurut Sjafrizal (2018) konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu dapat mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hal ini karena daerah akan cenderung tumbuh lebih cepat di daerah yang memiliki konsentrasi ekonomi cukup tinggi dibandingkan dengan daerah yang memiliki konsentrasi ekonomi lebih rendah. Jika konsentrasi ekonomi tersebut terjadi di daerah yang pembangunannya sudah lebih tinggi, maka ketimpangan pembangunan akan cenderung meningkat, begitupun sebaliknya.

Keuntungan berlokasi pada tempat konsentrasi atau terjadinya aglomerasi disebabkan oleh faktor skala ekonomi (*economic of scale*) dan aglomerasi (*economic of agglomeration*) (Tarigan, 2005). *Economic of scale* merupakan keuntungan karena dapat memproduksi berdasarkan spesialisasi sehingga produksi lebih besar dan biaya per unit lebih efisien, sementara *economic of agglomeration* ialah keuntungan karena di tempat itu terdapat berbagai layanan dan fasilitas yang dapat digunakan oleh perusahaan. Umumnya daerah yang lebih maju memiliki ketersediaan sarana dan prasarana serta memiliki permintaan yang cukup besar. Akibatnya konsentrasi

kegiatan ekonomi cenderung terjadi di daerah yang lebih maju, sehingga ketimpangan pembangunan akan cenderung meningkat (Sjafrizal, 2018).

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dua macam variabel, yakni variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). Variabel dependen merupakan variabel yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh variabel bebas, sedangkan variabel independen ialah variabel yang ada atau terjadi mendahului variabel bebasnya, yakni variabel yang menjelaskan terjadinya fokus atau topik penelitian (Priyono, 2016). Variabel dependen yang digunakan ialah ketimpangan pembangunan antar wilayah, sementara variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini ialah Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dana perimbangan, dan aglomerasi.

1. Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan perbedaan antara daerah maju dan daerah tertinggal yang diukur dengan tingkat Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita antar wilayah. Data ketimpangan pembangunan antar wilayah diperoleh dari nilai yang dihitung dengan menggunakan konsep PDRB per kapita relatif yang diformulasikan oleh Bonet (2006) dan digunakan peneliti sebelumnya oleh Angelia (2010) dan Yusica, dkk. (2018), dengan formulasi sebagai berikut:

$$RD_{i,t} = \left| \frac{PDRB \text{ Per kapita Kab/Kota } i,t}{PDRB \text{ Per kapita Provinsi } t} - 1 \right| \quad (1)$$

keterangan: $RD_{i,t}$ = Ketimpangan antar wilayah kabupaten/kota i tahun t ; PDRB Per kapita Kab/Kota = PDRB Per kapita Kabupaten/Kota i tahun t ; PDRB Per kapita Provinsi t = PDRB Per kapita Provinsi Banten tahun t .

2. Penanaman Modal Asing (PMA)

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya atau yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data realisasi PMA Provinsi Banten tahun 2011-2020 dengan satuan dollar yang bersumber dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

3. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Penelitian ini menggunakan data realisasi PMDN Provinsi Banten tahun 2011-2020 dengan satuan rupiah, yang datanya diperoleh dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

4. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan ialah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa realisasi dana perimbangan Provinsi Banten tahun 2011-2020 dengan satuan rupiah yang datanya bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

5. Aglomerasi

Brühlhart dan Sbergami (2009) mendefinisikan aglomerasi sebagai konsentrasi spasial kegiatan ekonomi. Pada penelitian ini, data aglomerasi diperoleh dari nilai yang dihitung dengan menggunakan LQ tenaga kerja atau bisa disebut juga *Hoover-Balassa Index* yang diformulasikan sebagai berikut:

$$Agl = \frac{\frac{E_{ij}}{\sum E_j}}{\frac{E_{iJ}}{\sum E_j}} \quad (2)$$

keterangan: Agl = Aglomerasi; E_{ij} = Tenaga Kerja Industri Besar dan Sedang di kabupaten/kota; $\sum E_j$ = Total Tenaga Kerja di kabupaten/kota; E_{iJ} = Tenaga Kerja Industri Besar dan Sedang di Provinsi Banten; $\sum E_j$ = Total Tenaga Kerja di Provinsi Banten.

Sbergami (2002) mengategorikan aglomerasi ke dalam beberapa *level*, diantaranya: dikatakan kuat bila angka indeks berada diatas 4, rata – rata atau sedang jika nilainya antara 2 dan 4, lemah jika nilainya diantara 1 sampai 2, nilai 0 sampai 1 berarti tidak terjadi aglomerasi atau wilayah tersebut tidak memiliki keunggulan komparatif untuk terjadinya aglomerasi.

Metode Pengumpulan, Jenis, dan Sumber Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi ialah cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada (Hardani dkk., 2020). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain (Tanjung dan Muliyani, 2021). Sumber data diperoleh dari berbagai sumber, seperti Badan Pusat Statistik, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel, yakni kombinasi dari data *time series* dan *cross section*. Estimasi yang biasa digunakan dalam analisis regresi data panel terdiri dari 3 macam pendekatan, yakni model *Common Effects*, *Fixed Effects* dan *Random Effects*. Penelitian ini menggunakan *Random Effect Model* (REM) serta uji hipotesis satu arah (*one-tail test*) untuk mengetahui pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Dana Perimbangan, dan Aglomerasi terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Provinsi Banten pada tahun 2011-2020. Adapun model yang digunakan untuk mengetahui ketimpangan antar wilayah di Provinsi Banten yaitu:

$$\ln(RD) = \beta_0 + \beta_1 \ln(PMA_{it}) + \beta_2 \ln(PMDN_{it}) + \beta_3 \ln(DP_{it}) + \beta_4 \ln(Ag_{it}) + \mu_{it} \quad (3)$$

keterangan

RD	= ketimpangan pembangunan
PMA	= penanaman modal asing
PMDN	= penanaman modal dalam negeri
DP	= dana perimbangan
Ag	= aglomerasi
i	= <i>cross section</i>
t	= <i>time series</i>
β_0	= konstanta
β_1	= koefisien
μ	= <i>error</i>

HASIL DAN PEMBAHSAN

Penentuan Model yang Digunakan

Dalam menentukan pendekatan model yang digunakan dalam analisis data panel dilakukan dengan melalui beberapa uji, diantaranya uji Chow, uji Hausman dan, uji *Lagrange Multiplier*. Berdasarkan hasil pengujian ketiga uji tersebut, model yang lebih baik untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model*.

Hasil Uji Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil uji normalitas diperoleh nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar $0,219698 >$ tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini telah berdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas dengan koefisien korelasi, diperoleh hasil bahwa nilai semua korelasi antar variabel-variabel independen kurang dari 0,8, sehingga dapat disimpulkan bahwa regresi dalam penelitian ini tidak terdapat masalah multikolinearitas. Adapun uji heteroskedasitas dan uji autokorelasi tidak dilakukan. Hal ini karena pada regresi dengan pendekatan *Random Effect Model* dengan estimasi *Generalized Least Square* (GLS) sudah terbebas dari gejala heteroskedasitas maupun autokorelasi (Gujarati dan Porter, 2013). Oleh karena itu uji yang dilakukan hanya uji normalitas dan multikolinearitas.

Analisis Regresi Data Panel dengan *Random Effect Model*

Tabel 2. Hasil Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Prob.	Alpha (α)	Keterangan
C	21,73259	0,0056		
PMA	-0,001798	0,9588	0,05	Tidak Signifikan
PMDN	0,001882	0,9076	0,05	Tidak Signifikan
DP	-0,830746	0,0036	0,05	Signifikan
Ag	0,131460	0,4799	0,05	Tidak Signifikan
Prob. F-Statistic				0,027721
R ²				0,171382
Adjusted R ²				0,113233

Berdasarkan hasil regresi tersebut, maka dapat dihasilkan persamaan regresi dan interpretasi sebagai berikut:

$$RD = 21,73259 - 0,001798 PMA + 0,001882 PMDN - 0,830746 DP + 0,131460 Ag + \mu \quad (4)$$

Berdasarkan hasil estimasi regresi diatas menunjukkan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) memiliki nilai probabilitas $>$ tingkat signifikansi (α), sehingga PMA tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah (RD) di kabupaten/kota Provinsi Banten tahun 2011-2020. Nilai koefisien regresi variabel PMA mempunyai tanda parameter negatif yakni sebesar -0,001798. Hal ini berarti apabila variabel PMA meningkat sebesar 1%, maka akan menurunkan variabel RD sebesar 0,001798%, namun secara tidak signifikan. Persebaran realisasi PMA di kabupaten/kota Provinsi Banten sudah mulai mengalami perbaikan dalam pemerataan, dibandingkan dengan sebaran realisasi PMDN. Temuan ini memiliki hasil yang serupa dengan penelitian Ibrahim (2019) yang menemukan bahwa PMA memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa. Dalam penelitiannya, peningkatan PMA yang mengakibatkan turunnya ketimpangan pembangunan tersebut mengindikasikan bahwa persebaran PMA di Pulau Jawa sudah mulai mengalami pemerataan. Tidak signifikannya pengaruh PMA terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Banten diduga karena realisasi PMA di kabupaten/kota Provinsi Banten masih memiliki tren yang tidak menentu.

Variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menunjukkan nilai probabilitas $>$ tingkat signifikansi (α), yang berarti PMDN tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah (RD) di kabupaten/kota Provinsi Banten tahun 2011-2020. Nilai koefisien regresi variabel PMDN memiliki tanda parameter positif yakni sebesar 0,001882. Hal ini berarti apabila variabel PMDN meningkat sebesar 1%, maka akan meningkatkan variabel RD sebesar 0,001882%, namun secara tidak signifikan. Seperti yang telah dikemukakan oleh Myrdal, ketimpangan berkaitan dengan sistem kapitalis yang dipengaruhi oleh motif laba (Jhingan, 1996). Sebaran investasi PMDN lebih banyak berada di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, juga Kota Cilegon yakni kota dengan kontribusi industri pengolahan terbesar terhadap PDRB Banten, serta dilengkapi berbagai fasilitas infrastruktur yang dapat menjadi magnet bagi para investor, sementara beberapa daerah pada beberapa tahun bahkan tidak mendapat investasi (PMDN) sama sekali. *Backwash effect* dari pergerakan modal yang lebih banyak masuk ke wilayah dikembangkan dapat merugikan daerah yang lebih tertinggal, yang dapat mengakibatkan ketimpangan pembangunan antar wilayah menjadi semakin lebar. Penelitian ini juga memiliki hasil yang sama dengan hasil penelitian Ilham dan Pangaribowo (2017) yang menemukan bahwa PMDN memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan, dimana PMDN di Indonesia masih bersifat tidak menentu, serta jumlah PMDN yang jauh berbeda di masing-masing provinsi. Begitu juga dengan penelitian ini, tidak signifikannya pengaruh PMDN terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Banten diduga karena realisasi PMDN di kabupaten/kota Provinsi Banten masih memiliki tren yang tidak menentu, bahkan di daerah dengan penerimaan realisasi PMDN terbesar, seperti Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang.

Variabel Dana Perimbangan (DP) menunjukkan nilai probabilitas $<$ tingkat signifikansi (α), yang berarti variabel DP berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah (RD) di kabupaten/kota Provinsi Banten tahun 2011-2020. Nilai koefisien regresi variabel DP memiliki tanda parameter negatif yakni sebesar $-0,830746$. Hal ini berarti apabila variabel DP meningkat sebesar 1%, maka akan menurunkan variabel RD sebesar $0,830746\%$. Alokasi dana perimbangan pada dasarnya bertujuan untuk menjamin pelaksanaan pemerintahan daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus untuk mengurangi ketimpangan pembangunan. Dana perimbangan tersebut lebih banyak dialokasikan ke daerah kabupaten dibandingkan kota, kecuali pada tahun 2011-2013 dimana Kota Tangerang menerima lebih besar daripada Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang. Penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan penelitian Bakri, dkk., (2016), dan Wahyuntari dan Pujiati (2018) dimana ketika suatu daerah memiliki lebih banyak dana perimbangan yang dialokasikan, maka alokasi fiskal pada daerah tersebut akan lebih tinggi, sehingga menjadikan daerah tersebut lebih leluasa menggunakan anggaran untuk belanja, seperti belanja pembangunan di sektor industri, perdagangan, dan lainnya, dengan cara memperbaiki infrastruktur publik yang ada. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya Dana Perimbangan sebagai bentuk pelaksanaan dari otonomi daerah telah memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah untuk menentukan sendiri kegiatan ekonomi maupun pembangunan yang sesuai, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing dan dapat mendorong proses pembangunan lebih cepat (Sjafrizal, 2018).

Variabel Aglomerasi (Ag) menunjukkan nilai probabilitas $>$ tingkat signifikansi (α), yang berarti variabel Aglomerasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah (RD) di kabupaten/kota Provinsi Banten tahun 2011-2020. Nilai koefisien regresi variabel Aglomerasi memiliki tanda parameter positif yakni sebesar $0,131460$. Hal ini berarti apabila variabel Aglomerasi meningkat sebesar 1%, maka akan meningkatkan variabel Aglomerasi sebesar $0,131460\%$, namun secara tidak signifikan. Wahyuntari dan Pujiati (2018) dalam penelitiannya menemukan bahwa kenaikan aglomerasi industri akan meningkatkan ketimpangan pembangunan, dimana daerah dengan tingkat aglomerasi industri cenderung rendah atau bahkan tidak terdapat aglomerasi berdampak pada rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah yang terlihat dari pendapatan sektor industri yang mempengaruhi besaran PDRB atau PDRB per kapita dan menyebabkan daerah tersebut menjadi daerah tertinggal. Menurut Sjafrizal (2018), konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu dapat mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hal ini disebabkan karena daerah akan cenderung tumbuh lebih cepat di daerah yang memiliki konsentrasi ekonomi cukup tinggi dibandingkan dengan daerah yang memiliki konsentrasi ekonomi lebih rendah. Adapun tidak signifikannya pengaruh aglomerasi terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Banten diduga karena aglomerasi di kabupaten/kota Provinsi Banten sendiri masih berada di kategori lemah dan sedang.

Hasil uji signifikansi simultan (F-statistik) menunjukkan nilai probabilitas F-statistik sebesar $0,027721 <$ tingkat signifikansi (α) yang digunakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil koefisien determinasi menunjukkan nilai *adjusted R-squared* (*adjusted R²*) sebesar $0,113233$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri

(PMDN), Dana Perimbangan, dan Aglomerasi dalam model dapat menjelaskan variabel ketimpangan pembangunan antar wilayah sebesar 11,32%, sedangkan sisanya sebesar 88,68% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Rendahnya nilai koefisien determinasi yang dihasilkan menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen pada model dalam menjelaskan variabel dependen terbatas.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, dana perimbangan, dan aglomerasi terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Banten. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik beberapa simpulan, sebagai berikut:

1. Penanaman Modal Asing (PMA) memiliki koefisien negatif sebesar $-0,001798$, dengan nilai probabilitas sebesar $0,9588$, lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan, sehingga PMA tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Banten
2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki koefisien positif sebesar $0,001882$, dengan nilai probabilitas sebesar $0,9076$, lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan, sehingga PMDN tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Banten
3. Dana Perimbangan memiliki koefisien negatif sebesar $-0,830746$, dengan nilai probabilitas sebesar $0,0036$, lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan, sehingga Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Banten dengan arah negatif.
4. Aglomerasi memiliki koefisien positif sebesar $0,131460$, dengan nilai probabilitas sebesar $0,4799$, lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan, sehingga Aglomerasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Banten
5. Nilai probabilitas F-statistik sebesar $0,027721$, lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) yang digunakan, sehingga secara simultan variabel penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, dana perimbangan, dan aglomerasi berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Banten.

SARAN

Beberapa rekomendasi dan saran untuk pihak terkait serta penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, realisasi PMDN di Provinsi Banten lebih banyak berada di wilayah Banten Utara dan Tengah jika dibandingkan dengan Banten Selatan (Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang). Hal ini dikarenakan investasi yang dapat masuk ke wilayah Banten Selatan pun terbatas. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten tahun 2010-2030, menyebutkan bahwa wilayah Banten Selatan, hanya untuk pengembangan kegiatan pertanian dan pariwisata, dan daerah konservasi. Selain itu daerah Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang juga merupakan wilayah yang fasilitas infrastrukturnya lebih tertinggal jika dibandingkan dengan daerah Banten lainnya. Oleh karena itu pemerintah perlu untuk memberikan dana perimbangan yang cukup besar pada daerah dengan

investasi swasta yang lebih kecil agar dapat digunakan untuk mempercepat pembangunan di wilayah Banten Selatan, dan diharapkan mampu mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Banten.

2. Investasi PMA di kabupaten/kota Banten mulai menunjukkan perbaikan, dimana Kabupaten Lebak sempat menerima realisasi PMA yang lebih besar daripada Kota Tangerang Selatan. Oleh karena itu meski investasi yang masuk terbatas oleh regulasi, pengembangan potensi ekonomi di daerah – daerah Banten Selatan perlu terus ditingkatkan melalui peningkatan investasi yang masuk.

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya diantaranya sebagai berikut:

1. Menambah periode waktu penelitian, sehingga penelitian selanjutnya bisa menggunakan periode waktu yang lebih panjang
2. Penggunaan proksi aglomerasi bisa menggunakan metode selain *Hoover Balassa Index*, untuk melihat apakah ada atau tidaknya perbedaan pada tingkat aglomerasi yang dihasilkan, sehingga dapat melihat pengaruh aglomerasi terhadap ketimpangan pembangunan menggunakan proksi aglomerasi yang lain
3. Menambahkan variabel independen lain yang tidak terdapat dalam model penelitian ini, penambahan variabel lainnya akan mencerminkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah

REFERESI

- Angelia, Y. (2010). *Analisis ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi DKI Jakarta tahun 1995-2008* (Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang). <https://core.ac.uk/download/pdf/11721982.pdf>
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi pembangunan* (5th ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Data PDRB per kapita dan jumlah penduduk Provinsi Banten tahun 2011-2020*. Banten.
- Bakri, S., & Aimon, H. (2016). Analisis ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Sumatera Barat dan kebijakan penanggulangannya. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 4.
- Bonet, J. (2006). Fiscal decentralization and regional income disparities: Evidence from the Colombian experience. *Annals of Regional Science*, 40(3), 661–676. <https://doi.org/10.1007/s00168-006-0060-z>
- Brühlhart, M., & Sbergami, F. (2009). Agglomeration and growth: Cross-country evidence. *Journal of Urban Economics*, 65(1), 48–63. <https://doi.org/10.1016/j.jue.2008.08.003>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2013). *Dasar-dasar ekonometrika* (5th ed.). Terjemahan: Raden C. M. Jakarta: Salemba Empat.
- Hardani, A., H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Ibrahim, M. M. (2019). *Analisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), penanaman modal asing (PMA), dan pengangguran terhadap ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa tahun 2012-2018* (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49792>

- Ilham, M., & Pangaribowo, E. H. (2017). Analisis ketimpangan ekonomi menurut provinsi di Indonesia tahun 2011-2015. *Jurnal Bumi Indonesia*, 6(4). <https://core.ac.uk/download/pdf/295176705.pdf>
- Jhingan, M. L. (1996). *Ekonomi pembangunan dan perencanaan* (1st ed.). Terjemahan: Guritno. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Priyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif*. Sidoarjo: Zifatma Publishing.
- Sbergami, F. (2002). Agglomeration and economic growth: Some puzzles. *HEI Working Paper*, 02. http://repec.graduateinstitute.ch/pdfs/Working_papers/HEIWP02-2002.pdf
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi regional: Teori dan aplikasi*. Padang: Baduose Media.
- Sjafrizal. (2018). *Analisis ekonomi regional dan penerapannya di Indonesia* (1st ed.). Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Tanjung, A. A., & Mulyani. (2021). *Metodologi penelitian: Sederhana, ringkas, padat, dan mudah dipahami*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Tarigan, R. (2005). *Ekonomi regional: Teori dan aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan ekonomi* (11th ed.). Terjemahan: Agus Dharma. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Wahyuntari, L. I., & Pujiati, A. (2018). Disparitas pembangunan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*, 5(3), 296–305. <https://doi.org/10.15294/edaj.v5i3.22153>
- Yusica, L. V., Malik, N., & Arifin, Z. (2018). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, aglomerasi, dan tingkat pengangguran terhadap ketimpangan antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(2), 230–240. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jie/article/download/6982/5913>